

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA CILEGON TAHUN 2018

A. Dasar Hukum Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Kota Cilegon

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon terbentuk atas dasar Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Kota Cilegon. Sekarang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016. Badan Kesbangpol Kota Cilegon merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Cilegon yang memiliki urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon yang mana sebelumnya berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008 adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang dan Linmas) Kota Cilegon, dengan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dimana salah satu bidang yaitu Bidang Perlindungan Masyarakat dikeluarkan dan sebagai penggantinya adalah Bidang Politik, maka dengan perubahan Nomen Kulatur tersebut tentu program yang dulunya ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Bidang Linmas di limpahkan kepada Badan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sedangkan untuk kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon diatur dalam Peraturan

Walikota Cilegon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Cilegon yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pemerintahan Kota Cilegon perlu tanggap terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya baik internal maupun eksternal dengan orientasi pada penyediaan layanan kemasyarakatan dengan penggunaan sejumlah sumber daya yang dimiliki baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam dalam artian adanya kemampuan mendeteksi apabila terjadi perkembangan demokrasi yang mana memerlukan perjuangan dari segi pemikiran untuk siap menerima sisi kebaikan dan kelemahan dari Demokrasi itu sendiri sehingga Pemerintah Kota Cilegon dapat membuat kebijakan yang baru untuk mengantisipasi hal tersebut dalam rangka lancarnya pembangunan semua bidang terlebih pada pembangunan di bidang ketentraman masyarakat serta ketertiban umum.

Salah satu ruang lingkup pembangunan dalam Pemerintahan Kota Cilegon adalah pada Bidang Ketahanan Ideologi dan Kewaspadaan Daerah, dimana salah satu topik perhatiannya terletak pada Ketahanan Ideologi wawasan kebangsaan dan bela negara serta kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen dalam rangka pengimplementasian hal tersebut dan adanya dasar kewenangan otonomi daerah dan dengan mengacu pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 4) yang menyatakan urusan wajib menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota adalah urusan yang berskala kabupaten/ kota, dimana salah satu urusan wajib tersebut adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman pada urusan masyarakat, dan berdasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan fungsi keuangan daerah untuk ketertiban dan ketentraman pada urusan Pemerintahan Daerah sebagai urusan wajib terletak pada Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dimana pada Pemerintahan Kota Cilegon diposisikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon sebagai salah satu instansi yang mendukung terciptanya dan terjaganya ketertiban dan ketentraman di wilayah Kota Cilegon untuk menyelaraskan predikat Kota Cilegon sebagai Kota Industri, Perdagangan dan Jasa dalam mewujudkan Kota Cilegon dengan Visi Walikota Cilegon yaitu “Terwujudnya Kota Cilegon Yang Unggul dan Sejahtera Berbasis Industri Perdagangan Dan Jasa“.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang juga diberi tugas dan kewenangan untuk menangani Bidang Politik Dalam Negeri, dimana tugas dan fungsinya untuk melakukan pembinaan Kelembagaan Partai dan Politik dan arah kebijakan politik yang mengacu pada Kementerian Dalam Negeri serta pendidikan Politik bagi seluruh Partai Politik yang ada di wilayah Kota Cilegon serta fasilitasi Pemilihan Umum, baik pada pemilihan umum Legislatif. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon yang kesemuanya akan dituangkan dalam RPJMD.

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon tahun 2016-2021 merupakan RPJMD kedua dari tahapan pelaksanaan RPJP Kota Cilegon tahun 2016, oleh sebab itu dalam penyusunan RPJMD selain menjabarkan juga memuat visi, misi dan program prioritas Walikota/Wakil Walikota Cilegon masa bakti 5 Tahun, RPJMD dan RTRW Kota Cilegon penyusunannya memperhatikan dan mempertimbangkan pola dan struktur tata ruang RT/RW. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Cilegon tahun 2016 secara substansi tidak terlepas dari motto daerah untuk mencerminkan tekad dan semangat yang tinggi dari masyarakat Kota Cilegon dalam ikut serta dan berperan aktif melanjutkan dan meningkatkan pembangunan daerah Kota Cilegon dengan tetap dilandasi Iman dan Taqwa, semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Adapun prioritas pembangunan untuk tahun 5 tahun meliputi pembangunan infrastruktur, penataan bangunan dan ruang, lalu lintas dan parkir, pengelolaan sampah, penataan ruang terbuka (RTH) dan pariwisata dimana prioritas-prioritas itu dalam perwujudannya harus adanya kerjasama dan peran serta yang saling mendukung diantara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan seluruh lapisannya yang ada di wilayah Kota Cilegon.

Salah satu faktor pendukung untuk pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut adalah adanya situasi dan kondisi lingkungan yang kondusif dan terkendali baik dari segi keamanan, ketertiban, ketentraman karena kondisi yang kondusif dan terkendali adalah merupakan prasyarat utama bagi berlangsungnya upaya-upaya pembangunan disemua bidang yang didukung oleh masyarakat yang mandiri, sadar, demokratis, berwawasan kebangsaan dan partisipatif.

Dengan adanya isu-isu strategis yang terangkum dari sasaran jangka menengah RPJMD yang menjadi pedoman dasar dalam telaahan rencana strategis yang tertuang pada fakta dan permasalahan RPJMD sebagai prioritas agenda perubahan yaitu pada politik, pemerintah dan hukum dimana hal ini dapat diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon.

Ruang lingkup dari perencanaan strategis ini berdasarkan pada tufoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di mana pembahasannya terakomodasi ke dalam rencana strategis yang berintikan kepada visi, misi, tujuan dan sasaran

yang dilaksanakan, kemudian untuk mencapai tujuan/ sasaran ditetapkanlah kebijakan, program dan kegiatan yang terjadwal ke dalam rencana kegiatan prioritas tahunan yang dapat dievaluasi setiap tahun berikutnya secara bertahap selama lima tahun.

Renstra ini bertujuan untuk memberikan arah, pedoman dan landasan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam bidang pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan politik, hubungan kelembagaan dan pengkajian strategis daerah.

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya sebagai perumusan strategik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, penggunaan sumberdaya semaksimal mungkin (aparatur; dengan segala keakuntabelannya-anggaran; seefektif dan seefisien mungkin tapi tepat guna- sarana dan prasarana; sebagai penunjang) dan juga sebagai tolak ukur dari pengukuran dan kinerjanya (evaluasi), sehingga melalui perencanaan strategis dapat diketahui kebutuhan riil berbagai permasalahan yang dihadapi dan pengambilan kebijakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk penyusunan kebijakan secara umum pada pemerintah Kota Cilegon.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan untuk menuju kondisi yang diharapkan maka untuk menentukan penentuan isu-isu startegis oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon menggunakan analisis sebagai upaya dalam menentukan dan mengembangkan faktor-faktor mana yang menjadi peluang-tantangan atau faktor kekuatan-kelemahan untuk mengatasi kendala yang ada dalam pencapaian target sasaran untuk meningkatkan

pencapaian tujuan dengan penentuan isu-isu strategis yang ingin dikembangkan adalah:

1. Saling mendukung antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Partai-partai Politik untuk menangkap peluang penyelenggaraan Pemilu Legislatif/ Presiden dan Pilkada yang selalu memicu dinamisnya pergerakan politik.
2. Banyaknya keberadaan organisasi-organisasi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat baik itu secara swadaya atau berkoordinasi dengan pemerintah dengan berlandaskan pada kesadaran dan berbangsa dalam wadah kesatuan negara Republik Indonesia yang ditunjang adanya pendidikan NKRI yang sudah dimulai dan ditanamkan sejak usia dini.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal, horisontal dan terkait, melakukan monitoring dan evaluasi Ipoleksosbud untuk menangkap peluang tidak bisa diprediksinya kapan ATHG akan muncul dan untuk mengimbangi makin meningkatnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Efektifitas perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) disusun sebagai bagian dari RPJM Kota Cilegon tahun 2014-2019, yang merupakan suatu kesatuan perencanaan pembangunan jangka menengah dalam mengelola dinamika politik, wawasan kebangsaan, konflik, dan pendidikan demokrasi dan stabilitas sosial di wilayah Kota Cilegon, sebagai bagian dari dokumen perencanaan RPJM Kota Cilegon.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun program kerja dan kegiatan seriap tahun berdasarkan tugas pokok dan analisa kebutuhan kegiatan setiap 5 tahun ke depan. Sehingga diharapkan impementasi program

dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (Lima) tahun ke depan dapat tersinkronisasi dan berkesinambungan sehingga pelaksanaan visi dan misi daerah dapat tergambar dan bisa terlaksana dalam program perencanaan dan kegiatan.

Rencana strategis pada dasarnya merupakan bagian dari dokumen perencanaan badan kesatuan bangsa dan politik yang menjadi dasar dan panduan usulan program dan kegiatan setiap tahun anggaran, sehingga sasaran pembangunan di bidang politik, kebangsaan, kesatuan, penyelesaian konflik, pendidikan demokrasi, serta nilai-nilai luhur kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dapat disusun secara terencana. Dalam penyusunan program kegiatan perlu perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan kesinambungan dari program dengan tujuan agar dapat diukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program tersebut, sehingga dapat menjadi acuan bagi pembangunan maupun perluasan untuk penyusunan program selanjutnya.

Dalam konteks tersebut diharapkan penyusunan dan pengalokasian anggaran untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon dapat memperhatikan perkembangan dan dinamika politik dan keamanan di daerah selama 5 (lima) tahun terakhir terus meningkat sehingga diharapkan penanganan masalah-masalah politik, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat berlangsung maksimal untuk menjalin stabilitas daerah, dalam mendukung proses pembangunan di daerah, terutama perkembangan tantangan dan ancaman sehingga dapat diantisipasi dan direspon sedini mungkin dengan berbagai program dan action pembangunan untuk mewujudkan daerah yang kondusif bagi terwujudnya cita-cita dan tujuan

nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan rencana pembangunan, mengamanatkan perlunya dilakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program atau kegiatan dan anggaran yang hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan serta program/kegiatan tahun berikutnya. sebagaimana amanat dijelaskan bahwa evaluasi merupakan suatu tahapan dalam perencanaan pembangunan yaitu meliputi; penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, termasuk di dalamnya tuntutan adanya penyusunan kegiatan pelaporan secara berkala dan berjenjang baik triwulan maupun tahunan oleh masing-masing kementerian/lembaga, juga unit organisasi dan unit kerja pada masing-masing kementerian/lembaga.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berdasarkan realisasi keuangan, kinerja dan capaian fisik atas pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran periode juga merupakan analisis dari seluruh pelaksanaan program/kegiatan yang telah berjalan selama satu tahun anggaran sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan keuangan Negara serta hasil pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Kota Cilegon. Perencanaan

pembangunan pada program pembinaan kesatuan bangsa dan politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri merupakan bagian dari arah kebijakan dalam konteks pembangunan jangka panjang nasional, yang dirumuskan dalam tiga pilar pokok yaitu:

1. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik
2. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi dan menjaga stabilitas sistem politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri; serta
3. Meningkatkan kapasitas pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui tiga pilar tersebut, dirumuskan kebijakan yang diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian misi pembangunan Nasional yaitu mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil dan demokratis serta sejahtera. Berdasarkan arah kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, di harapkan fungsi-fungsi pemerintahan dalam semua strata dapat dilaksanakan dengan baik. Mantapnya penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang didukung oleh stabilitas politik dalam negeri tersebut menjadi landasan utama bagi upaya peningkatan peran pemerintahan yang lebih responsif terhadap perbaikan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu komponen di Kementerian Dalam Negeri merespon arah kebijakan tersebut khususnya dalam rangka stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Perencanaan yang sudah dibuat oleh para manajer dalam segala tingkatan manajemen organisasi dalam periode waktu tertentu mesti ditinjau ulang, apakah masih efektif untuk terus diaplikasikan dalam kegiatan organisasi ataukah harus diadakan perubahan, modifikasi, atau bahkan diganti dengan perencanaan yang baru. Untuk meninjau ulang dan menilai suatu perencanaan dibutuhkan kriteria-kriteria tertentu, sehingga

efektivitas perencanaan tersebut tetap terjaga. Fungsi lain dari suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana.

Fleksibilitas adalah esensi bagi kesuksesan perencanaan strategik. Rencana juga sangat membutuhkan stabilitas, karena bila rencana terlalu sering berubah para pegawai tidak terbiasa dengan rencana tersebut sebagai suatu peralatan pengoprasian dan menjadi tidak efektif rencana juga perlu mempunyai kontinuitas ,agar perencanaan dapat berkesinambungan. Rencana mesti sederhana untuk memberikan cara pencapaian tujuan dengan sedikit mungkin faktor-faktor, kekuatan-kekuatan dan pengaruh-pengaruh dalam setuasi, serta hubungan-hubungan antara pegawai lainnya. Rencana-rencana juga harus di evaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen hanya akan efektif jika didasarkan atas informasi yang tepat dan didasarkan pada pemikiran realistik dan fakta-fakta yang sebenarnya tentang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dibanding saran pribadi pembuat rencana agar perencanaan tersebut dapat tercapai. Proses penyusunan harus didasarkan atas pemikiran yang objektif. Manajemen kinerja juga merupakan instrument untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik dari organisasi, tim dan para individu dengan mengelola kinerja sesuai dengan tujuan, sasaran dan standar yang telah disepakati bersama. Manajemen kinerja sebagai proses komunikasi yang berkelanjutan antara atasan dan bawahan untuk memperjelas dan menyepakati fungsi pokok pekerjaan bawahan dan pelaksanaannya guna berkontribusi mencapai tujuan organisasi, manajemen kinerja bukanlah proses satu arah dari atas kebawah, melainkan proses interaktif dimana terjadi dialog dan diskusi antara atasan dan bawahan berkenaan dengan target pekerjaan bawahan.

Untuk itu, manajemen kinerja memiliki lima komponen sebagai berikut:

1. Perencanaan kerja dimana atasan dan bawahan berupaya merumuskan, memahami dan menyepakati target kinerja bawahan dalam rangka mengoptimalkan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan-tujuan organisasi;
2. Komunikasi berkelanjutan antara atasan dan bawahan guna memastikan bahwa apa yang telah, sedang dan akan dilakukan bawahan mengarah pada target kerjanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, serta guna mengantisipasi segala persoalan yang mungkin timbul;
3. Pengumpulan data dan informasi oleh masing-masing pihak sebagai bukti pendukung realisasi kinerja bawahan. Pengumpulan dapat dilakukan melalui formulir penilaian kinerja, observasi langsung maupun tanya jawab dengan pihak-pihak terkait;
4. Pertemuan tatap muka antara atasan dan bawahan untuk mengkaji bukti-bukti otentik kinerja bawahan diklarifikasi, didiskusikan dan disimpulkan bersama sebagai kinerja bawahan pada periode tertentu;

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan/instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.

Dalam melaksanakan kegiatan tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Adapun hambatan dan permasalahan di Badan Kesbangpol Kota Cilegon yaitu:

1. Pada Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Anggaran yang belum mencukupi kegiatan.
2. Belum terlaksananya sinkronisasi program kegiatan kesatuan bangsa antara tingkat kecamatan dan kelurahan dengan kesbang.
3. Belum optimalnya organisasi mitra kesatuan bangsa. Mitra : Forum FKUB, FKDM.
4. Belum terpadunya keselarasan program antara institusi seperti : Kodim, Koramil dalam pembinaan kegiatan bela negara.

2. Program Peningkatan LSM dan Ormas permasalahan yang dihadapi adalah:

- a. Banyaknya anggota Ormas/LSM yang telah dibentuk tapi tidak mendaftarkan ke Badan Kesbang dan Linmas.
- b. Masih banyaknya LSM yang belum melengkapi persyaratan.
- c. Masih banyaknya LSM belum memiliki Akte Notaris.

d. Kurangnya penyuluhan tentang narkoba sehingga masih belum melaksanakan sampai ke tingkat masyarakat.

e. Kurang Komunikasi antara pihak terkait seperti kepolisian dalam memperoleh data dan laporan terutama yang berkaitan peredaran, penyalahgunaan Narkoba;

f. Kurangnya anggaran yang tersedia untuk melakukan penyuluhan Narkoba terutama untuk para pelajar sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

3. Program Perlindungan Masyarakat permasalahan yang dihadapi adalah:
 - a. Anggaran yang belum mencukupi.
 - b. Belum optimalnya kemampuan dan keterampilan anggota linmas.
 - c. Belum terbentuknya lembaga/organisasi yang menaungi Satlinmas.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur permasalahan yang dihadapi adalah:

Sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu lembaga. Kondisi eksisting Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon saat ini dari sisi kuantitas jumlah pegawai masih kurang. Hal ini terbukti bahwa hampir di setiap Kasubid/Kasubag hanya memiliki rata-rata 1 atau 2 orang staf pelaksana, sehingga jumlah pegawai tidak sebanding dengan beban kerja yang ada. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia pada Badan Kesbang dan Politik Kota Cilegon baik dari kuantitas maupun latar belakang pendidikan.

B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Kota Cilegon

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang dan Linmas) Kota Cilegon berganti menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008. Perda Nomor 3 Tahun 2016 menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di mana salah satu bidang yaitu Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) dikeluarkan dan sebagai penggantinya adalah Bidang Politik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon⁶⁴ diperoleh keterangan bahwa kedudukan Badan

⁶⁴ Wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon, pada tanggal 8 Januari 2019

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon adalah sebagai salah satu unsur pendukung tugas Walikota Cilegon yang bertanggung jawab kepada Walikota Cilegon melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Badan kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang meliputi Wawasan Kebangsaan, Pemantapan Ideologi dan bela Negara, Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan serta Penanganan Konflik

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon,⁶⁵ Badan Kesbangpol Kota Cilegon menyelenggarakan fungsi, yaitu:

11. Perumus kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Pemahaman Ideologi, dan Bela Negara;
14. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Organisasi Sosial Politik dan Penanganan Konflik Sosial;
15. Penyelenggaraan dukungan pelayanan pemerintahan

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon,⁶⁶ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon mempunyai beberapa bidang yang salah satu bidangnya adalah Bidang Kesatuan Bangsa yang mempunyai tugas:

⁶⁵ Wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon, pada tanggal 8 Januari 2019

- f. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan dalam rangka pembinaan wawasan Kebangsaan dan Pemantapan Ideologi dan Bela Negara;
- g. Merumuskan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program bidang kesatuan bangsa;
- h. Merumuskan bahan kebijakan peningkatan kapasitas aparatur bidang pembinaan wawasan Kebangsaan dan Pemantapan Ideologi dan Bela Negara;
- i. Merumuskan bahan koordinasi tugas dan program kegiatan fasilitasi kajian strategis bidang kesatuan bangsa;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon,⁶⁷ salah satu sub bidang dalam bidang Kesatuan Bangsa adalah Sub Bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan yang mempunyai tugas:

- j. Menghimpun dan mempelajari berbagai peraturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berkaitan dengan wawasan kebangsaan;
- k. Menghimpun dan mengolah data wawasan kebangsaan;
- l. Melaksanakan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- m. Menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai sejarah kebangsaan;

⁶⁶ Wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon, pada tanggal 8 Januari 2019

⁶⁷ Wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon, pada tanggal 8 Januari 2019

- n. Melakukan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan bagi segenap lapisan masyarakat, kualitas wawasan kebangsaan bagi segenap lapisan masyarakat;
- o. Melakukan fasilitasi untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis dan suku-suku bangsa (FPK);
- p. Melakukan fasilitasi untuk meningkatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- q. Melakukan fasilitasi untuk meningkatkan kondusifitas daerah dengan mengoptimalkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Salah satu bagian dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon adalah Badan Kesatuan Bangsa. Badan Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas Memimpin dan merencanakan penyusunan program dan pengendalian anggaran Bidang Kesatuan Bangsa, mengkoordinir, menyelenggarakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa kepada bawahan, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bidang Kesatuan Bangsa berjalan dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon,⁶⁸ fungsi dari Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa antara lain:

⁶⁸ Wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon, pada tanggal 8 Januari 2019

11. Merencanakan operasional kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dari hasil perumusan program dengan melakukan koordinasi agar terlaksana dengan baik;
12. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian untuk kelancaran tugas;
13. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan arahan agar terlaksana dengan baik dan benar;
14. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan pengawasan melekat agar terlaksana sesuai dengan aturan;
15. Mengatur kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi wawasan kebangsaan, pematapan ideologi dan bela negara agar terarah sesuai dengan ketentuan;
16. Mengendalikan kegiatan di setiap sub bidang pada Bidang Kesatuan Bangsa dengan mengkoordinir tugas agar tercipta kesinergisan;
17. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di Bidang Kesatuan Bangsa;
18. Mengevaluasi kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa melalui hasil yang telah dicapai sehingga dapat mengukur pencapaian kinerja;
19. Melaporkan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dengan menyusun laporan untuk diketahui Kepala Badan mengenai tingkat kinerja yang telah dilaksanakan;
20. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon,⁶⁹ Kepala Bidang Kesatuan Bangsa membawahi 2 Sub Bidang, yang salah satunya dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan. Tugas pokok dari Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan adalah Merencanakan dan mengontrol kegiatan Sub

⁶⁹ Wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon, pada tanggal 8 Januari 2019

Bidang Wawasan Kebangsaan, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Fungsi dari Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, antara lain:

- j. Merencanakan kegiatan Sub Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dari hasil perumusan program dengan menyusun kegiatan agar terencana dengan baik;
- k. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian untuk kelancaran tugas;
- l. Memberi petunjuk kepada bawahan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dengan arahan agar terlaksana dengan baik dan benar;
- m. Membimbing bawahan dalam menyelesaikan tugas dengan memberikan arahan sehingga terlaksana dengan baik;
- n. Memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data di Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, penyiapan bahan penyelenggaraan di Bidang Wawasan Kebangsaan, serta pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Wawasan Kebangsaan dengan teliti agar tugas dilaksanakan dengan benar;
- o. Mengoreksi hasil kerja bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data di Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, penyiapan bahan penyelenggaraan di Bidang Wawasan Kebangsaan, serta pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Wawasan Kebangsaan dengan memperbaiki hasil kerja agar sesuai dengan petunjuk dan aturan;

- p. Mengontrol setiap pekerjaan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis di Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data di Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, penyiapan bahan penyelenggaraan di Bidang Wawasan Kebangsaan, serta pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan dengan mengawasi agar efektif dan efisien;
- q. Melaporkan kegiatan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menyusun laporan untuk diketahui tingkat kinerja;
- r. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Kesbangpol Kota Cilegon sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan pemerintah Kota Cilegon, berkewajiban untuk mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon dalam mewujudkan Visi Kota Cilegon, yaitu “Terwujudnya Kota Cilegon yang Unggul dan Sejahtera Berbasis Industrial Perdagangan dan Jasa.”

Berdasarkan Visi Kota Cilegon tersebut, diperlukan sejumlah Misi yang mengarahkan pencapaian Visi secara sistematis. Badan Kesbangpol Kota Cilegon mengimplementasikan misi ke-5 dan misi-misi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Memantapkan Kemandirian Perekonomian Daerah;
2. Memantapkan Lingkungan Kota Yang Asri dan Lestari;
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota;
5. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan Misi Kota Cilegon Tahun 2016-2021, Badan Kesbangpol Kota Cilegon merepresentasikan misi ke-5 yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.” Untuk mendukung hal tersebut, Badan Kesbangpol Kota Cilegon menuangkan sasaran strategis, yaitu:

1. Terselenggaranya Dukungan Pelayanan Pemerintahan;
2. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Peran Masyarakat dalam Konstelasi Pembangunan Daerah;
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Hukum Daerah.

Dalam proses pencapaian sasaran strategis, Badan Kesbangpol Kota Cilegon mencanangkan program-program dalam melaksanakan pelayanan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Cilegon, yaitu:

1. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan;
2. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
3. Program Peningkatan Organisasi Sosial Politik dan Penanganan Konflik Sosial.

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam bidang kesatuan bangsa, maka dicanangkanlah Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan. Program ini berisikan program dan kegiatan mengenai peningkatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat Kota Cilegon. Dalam program ini didapat data ukuran tingkat pemahaman, pembauran, dan lainnya yang berhubungan dengan kesatuan bangsa. Berikut penjelasan mengenai capaian Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan pada tahun 2018.

1. Tingkat Pemahaman Terhadap Wawasan Kebangsaan, Ideologi Negara, Toleransi Antar Umat Beragama, dan Antar Etnis di Kota Cilegon (66,66%).

Capaian target pada program ini mencapai 66,66% dengan target perencanaan 55%. Pencapaian target tersebut masih belum memuaskan karena salah satu kegiatan (Fasilitasi dan pendampingan FKDM, FPK, dan PPWK Kota Cilegon (Permendagri No.12/2006 dan Permendagri No 71/2012)) yang menjadi data pada indikator ini tidak berjalan dengan baik. Sistematis pada indikator ini, yaitu:

- a. Target kinerja pada kegiatan Forum Grup Discussion (FGD) Penguatan Wawasan Kebangsaan Pemuda di Kota Cilegon dengan estimasi persentase target 33,33% dan capaian realisasinya mencapai 33,33%. Realisasi tersebut didapat berdasarkan target capaian kegiatan yang terpenuhi, yaitu pemuda (40 pemuda) yang menjadi peserta FGD Penguatan Wawasan Kebangsaan Pemuda di Kota Cilegon memahami materi yang telah diberikan mengenai Wawasan Kebangsaan di Kota Cilegon;

- b. Target kinerja pada kegiatan Diseminasi Lingkungan Rukun dan Kehidupan Harmonis Antar Umat Beragama dengan estimasi persentase target 33,33% dan realisasi target 33,33%. Capaian realisasi tersebut didapat dari target capaian kegiatan yang terpenuhi, yaitu penyampaian tentang pemahaman lingkungan rukun dan harmonis

antar umat beragama yang dilakukan Badan Kesbangpol Kota Cilegon terpenuhi sebanyak 8 kecamatan;

c. Target kinerja pada kegiatan Fasilitasi dan pendampingan FKDM, FPK, dan PPWK Kota Cilegon (Permendagri No. 72/2006 dan Permendagri No. 71/2012) dengan estimasi persentase target 33,33% dengan realisasi 0%. Sistematis target ini dilihat dari tingkat pemberdayaan FKDM, FPK, dan PPWK yang belum tercapai;

2. Indeks Demokrasi Provinsi Banten (96%).

Capaian target kinerja Indeks Demokrasi Kota Cilegon mencapai 73,72 point dari target sebelumnya 76 point. Hal itu berdasarkan hasil publikasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten yang mencapai 73,72 point.

3. Cakupan Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (100%).

Data pada indikator ini meliputi tiga kegiatan pada Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan. Target pada indikator ini yaitu 55% dengan capaian indikator 100%. Realisasi capaian pada indikator dijelaskan sebagai berikut:

a. Target kinerja pada kegiatan Lomba Kampung Merah Putih Se-Kota Cilegon dengan estimasi 33,33% dan capaian realisasi 33,33%. Target ini dapat tercapai dilihat dari 8 peserta lomba menerapkan Kampung Merah Putih di setiap lingkungan masyarakatnya dengan memenuhi indikator-indikator yang telah ditentukan.

b. Target kinerja pada kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Merah Putih dengan estimasi 33,33% dan

capaian realisasi 33,33%. Capaian tersebut didapat dari terpenuhinya target kegiatan dan dilihat dari lingkungan yang mendapatkan sosialisasi tentang kampung merah putih lalu mengimplementasikan lingkungannya menjadi kampung merah putih sebanyak 8 lingkungan.

- c. Target kinerja pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Konsensus kebangsaan NKRI bagi Aparatur Pemerintah Daerah dengan estimasi 33,33% dan capaian realisasi 33,33%. Capaian tersebut dilihat dari target 50 ASN yang diberikan pemahaman terkait konsensus kebangsaan NKRI.

4. Cakupan Penerapan Bela Negara (100%).

Data yang diperoleh pada kegiatan ini didapat dari 3 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang berkaitan dengan bela negara yang ada di Kota Cilegon. Perolehan pada indikator ini mencapai 100% yang didapat dari sistematika sebagai berikut:

- a. Target kinerja pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Bela Negara Kota Cilegon mencapai target yang ditentukan sebelumnya yaitu 50 peserta kegiatan memahami pemahaman bela negara di Kota Cilegon. Seluruh peserta tersebut berasal dari unsur Kamtibmas 8 Kecamatan, Ormas/LSM, dan mahasiswa di Kota Cilegon. Estimasi persentase kegiatan untuk indikator ini yaitu 50%.
- b. Selain kegiatan di atas, kegiatan Peningkatan kesadaran Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa Bagi Pelajar dan Mahasiswa mencapai target yang telah ditentukan. Target yang dicapai yaitu 100 peserta kegiatan memahami nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa di Kota

Cilegon. Estimasi persentase kegiatan pada indikator Cakupan Penerapan Bela Negara yaitu 50%.

Wawasan Kebangsaan adalah sikap bangsa untuk bergerak bulat dalam rasa kebangsaan guna berbakti bagi kepentingan bangsa dan negara. Nilai-nilai karakter yang tercermin dalam wawasan kebangsaan adalah semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Semangat kebangsaan tercermin dalam cinta tanah air tercermin dalam bangga dengan warisan dari leluhur, memperingati hari Kartini, memperingati hari 17 Agustus 1945.

Menurut Anderson dalam Soegito⁷⁰ konsep kebangsaan merupakan jiwa, cita-cita, atau falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya. Ia merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan politik. Selanjutnya dikatakan bahwa sesungguhnya konsep “bangsa” itu adalah suatu komunitas terbayang (*imagined community*). Sebagai komunitas terbayang, maka konsep kebangsaan terletak dalam alam pikiran para pendukungnya, yang membayangkan diri sebagai suatu bangsa.

Wawasan kebangsaan sebagai pembentuk pandangan yang sehat dan wajar dalam jangka panjang. Terlepas dari komunalisme, diskriminasi dan perlakuan tidak adil kepada “orang lain” yang sebangsa dan setanah air, jelas pula bahwa masalahnya masih harus dipecahkan dalam lingkup masing-masing bangsa, dengan peranan lembaga internasional hanya sebagai penunjang belaka. Kekuasaan efektif atas warga negara masih harus dilakukan oleh alat pemerintahan dalam lingkup negara bangsa. Dengan demikian, justru diperlukan wawasan kebangsaan guna memberikan isi kepada kerangka penanganan masalah itu secara mendasar.

⁷⁰ Soegito, 2013, *Nasionalisme, Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Karakter Bangsa*, Widya Karya, Semarang, hlm. 125

Wawasan kebangsaanlah yang akan menyadarkan semua warga negara akan pentingnya arti hidup bersama atas dasar persamaan status dan hak di muka undang-undang, yang akan menjamin ketrentaman hidup seluruh bangsa. Sedangkan persamaan status dan hak adalah pangkal dari kedaulatan hukum, padahal itulah yang diperlukan pihak mayoritas untuk menegakkan persamaan status dan hak di lingkungan intern masing-masing golongan, termasuk kaum mayoritas etnis atau agama itu sendiri.⁷¹

Wawasan kebangsaan dengan demikian menghindarkan kita untuk sekedar mencari materi dan kekuasaan dengan segala bentuk legalisasinya untuk kepentingan pribadi, tetapi mendorong, memberi motivasi dan mengarahkan kita melaksanakan pembangunan nasional sebagai sarana untuk justru menghargai manusia Indonesia seutuhnya secara keseluruhan dan mengangkat harkat dan martabatnya dari lembah keterbelakangan, serta bangkit mempertahankan kemandiriannya.⁷²

Wawasan kebangsaan justru akan menyadarkan warga negara akan pentingnya arti hidup bersama atas dasar persamaan dan kewajiban di hadapan hukum, sebagai pembentukan tata pandang yang sehat dan wajar mengenai masa depan justru dalam menghadapi krisis itu wawasan kebangsaan mempunyai misi ganda sebagai berikut.

1. Mendukung suatu Unikum dalam arti suatu pengolahan berbagai sub-Unikum dalam suatu rangkaian kerangka kebangsaan. Fenomena usaha itu dapat dilihat

⁷¹ Budiono Kusumohamidjojo, 1993, *Pendidikan Wawasan Kebangsaan Tantangan Dinamika Perjuangan Kaum Cendekiawan Indonesia*. PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 6

⁷² *Ibid*, hlm. 11

pada Uni Soviet yang menjelma menjadi CIS yang longgar, yang meniadakan suatu wawasan kebangsaan dalam bentuk yang mirip dengan suatu Oikumener.

2. Wawasan kebangsaan dapat efektif untuk mengelola suatu bangsa yang besar, dalam mana setiap Unikum dapat mempertahankan keunikannya. Di India dibuktikan bahwa perlakuan terhadap hak dan kewajiban hukum yang merata dan sama sifatnya berakibat pada pelaksanaan hukum yang seragam, dan ternyata tidak hanya menjamin persatuan India tetapi juga memberikan peluang untuk memecahkan aneka masalah nasional.⁷³

Wawasan kebangsaan Indonesia yang diawali sejak Sumpah Pemuda tahun 1928 tidak terlepas dari sejarah kelahiran kembali bangsa Indonesia melalui proklamasi 17 Agustus 1945. Laut bagi bangsa Indonesia bukan menjadi pemisah tetapi justru ke luar sebagai wahana yang menghubungkan dengan bangsa lain sedangkan ke dalam merupakan unsur pemersatu.⁷⁴

Nilai-nilai karakter yang tercermin dalam wawasan kebangsaan adalah semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Menurut Narwanti,⁷⁵ semangat kebangsaan adalah cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Menggunakan bahasa Indonesia, menghargai perbedaan diantara teman, dan menjaga kebudayaan bangsa. Cinta tanah air adalah cara berfikir, bertindak, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan

⁷³ *Ibid*, hlm. 14

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 16

⁷⁵ Sri Narwanti, 2011, *Pendidikan Karakter Pengintegrasian 18 Nilai Pembentuk Karakter dalam Mata Pelajaran*, Familia, Yogyakarta, hlm. 30

fisik, soial, budaya, ekonomi dan politik bangsa, menyukai budaya nusantara, dan bangga menggunakan produk Indonesia.

Konsep wawasan kebangsaan mengandung 2 aspek yaitu aspek moral dan aspek intelektual. Aspek moral, konsep wawasan kebangsaan menyaratkan adanya perjanjian diri atau *commitment* pada seseorang atau masyarakat untuk turut bekerja bagi kelanjutan eksistensi bangsa serta bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa. Aspek intelektual, konsep wawasan kebangsaan menghendaki pengetahuan yang memadai mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa, baik sekarang maupun di masa yang akan datang serta potensi-potensi yang dimiliki bangsa.⁷⁶

C. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Kota Cilegon

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon,⁷⁷ diperoleh keterangan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon menjalankan tugas dan fungsi melayani masyarakat dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Cilegon. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut berdasarkan pada isu strategis yang sedang dihadapi, beberapa isu strategis yang dihadapi, antara lain:⁷⁸

⁷⁶ Budiono Kusumohamidjojo, 1993, *Op. Cit*, hlm. 228

⁷⁷ Wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon, pada tanggal 8 Januari 2019

⁷⁸ Wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon, pada tanggal 8 Januari 2019

1. Kualitas pemahaman dan penerapan ideologi bangsa serta wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam kesadaran bela negara di lingkungan masyarakat;
3. Potensi konflik sosial dalam kehidupan masyarakat dari aspek politik, sosial, dan budaya;
4. Aktivitas Ormas yang belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Optimalisasi penyelenggaraan tata kelola kelembagaan dan kapasitas SDM aparatur.

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon, sebagai berikut:⁷⁹

1. Selaku instansi/organisasi yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang koordinasi dan fasilitasi pembinaan demokratisasi dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan; pembinaan dan hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat; serta pembinaan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi lainnya.
2. Sebagai fasilitasi diaspek sosial kemasyarakatan yang heterogen, membina hubungan sinergis dengan instansi vertikal, horisontal dan terkait; pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Ipoleksosbud untuk mengantisipasi tidak dapat diprediksinya kapan ATHG muncul dan menjaga rasa kesatuan berbangsa.⁸⁰

⁷⁹ Wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon, pada tanggal 8 Januari 2019

⁸⁰ Wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon, pada tanggal 8 Januari 2019

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan KesbangPol Kota Cilegon memiliki jumlah pegawai sebanyak 29 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Pegawai Badan KesbangPol Kota Cilegon

Berdasar Status Kepegawaian

NO	STATUS	JUMLAH
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	17 Orang
2.	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	1 Orang
3.	Tenaga Kerja Lepas (THL)	9 Orang
4.	Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	2 Orang
JUMLAH		29 Orang

Sumber: Lakip Badan Kesbangpol Kota Cilegon, 2018

Menurut hasil penelitian, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berkorelasi positif terhadap kinerja suatu organisasi, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas SDM perlu senantiasa dilakukan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penambahan kemampuan teknis manajerial baik melalui jalur pendidikan formal (swadana atau beasiswa) maupun melalui kegiatan pendidikan latihan (diklat) teknis fungsional atau perencanaan.

Berdasar jenjang pendidikan, kurang lebih 80% dari jumlah pegawai Badan KesbangPol Kota Cilegon saat ini telah menempuh pendidikan sarjana, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2

Komposisi Pegawai Badan KesbangPol Kota Cilegon

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	STATUS	JUMLAH
1.	S3	-
2.	S2	8 Orang
3.	S1	12 Orang
4.	D3	1 Orang
5.	SLTA	8 Orang
6.	SLTP	-
7.	SD	-
JUMLAH		29 Orang

Sumber: Lakip Badan Kesbangpol Kota Cilegon, 2018

Tabel 3

Jumlah Pegawai Badan KesbangPol Kota Cilegon

Menurut Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda	IV.c	1 Orang
2.	Pembina TK. I	IV.b	1 Orang
3.	Pembina	IV.a	1 Orang
4.	Penata TK. I	III.d	3 Orang
5.	Penata	III.c	6 Orang
6.	Penata Muda TK. I	III.b	3 Orang
7.	Pengatur TK. I	II.d	1 Orang
8.	Pengatur Muda TK. I	II.a	1 Orang
JUMLAH			17 Orang

Sumber: Lakip Badan Kesbangpol Kota Cilegon, 2018

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Cilegon antara lain:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Kesenjangan antara SOTK dengan Sikat Daerah

Badan Kesbangpol mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik serta mendorong penciptaan keamanan dan ketertiban guna mendukung kehidupan masyarakat yang kondusif untuk pembangunan, susunan program kegiatan yang terencana dan terstruktur dengan kesinambungan yang baik akan membantu dalam memetakan kondisi masyarakat sesuai dengan kondisi transimbas yang ada di wilayah tersebut. Dengan memahami peta kondisi masyarakat maka perhatian pemerintah dalam membangun kondisi transtibmas di masyarakat akan tepat pada sasaran. Perhatian utama dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah perkembangan situasi politik di daerah yang akan terus mengalami perubahan.

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon,⁸¹ dalam melaksanakan kegiatan tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Adapun hambatan dan permasalahan di Badan Kesbangpol Kota Cilegon pada Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan adalah:

1. Anggaran yang belum mencukupi kegiatan.
2. Belum terlaksananya sinkronisasi program kegiatan kesatuan bangsa antara tingkat kecamatan dan kelurahan dengan kesbang.

⁸¹ Wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon, pada tanggal 8 Januari 2019

3. Belum optimalnya organisasi mitra kesatuan bangsa. Mitra : Forum FKUB, FKDM.
4. Belum terpadunya keselarasan program antara institusi seperti : Kodim, Koramil dalam pembinaan kegiatan bela negara.

Salah satu kegiatan yaitu Fasilitasi dan pendampingan FKDM, FPK, dan PPWK Kota Cilegon (Permendagri No. 72/2006 dan Permendagri No 71/2012) mencapai capaian kinerja dengan persentase 0%. Capaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Pertama, faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu pasifnya organisasi FDKM, FPK, dan PPWK Kota Cilegon dalam melaksanakan koordinasi dengan Badan Kesbangpol Kota Cilegon. Kedua, regulasi yang telah dicanangkan sebelumnya tidak sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon,⁸² agar Program dan kegiatan tetap dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, maka dilakukan upaya upaya pemecahan masalah terhadap seluruh permasalahan yang ada di masing masing Program/kegiatan.

1. Koordinasi dengan Provinsi maupun Pusat untuk menelusuri regulasi tentang pembinaan Politik.
2. Mengusulkan agar di Bentuknya Badan Narkotika tingkat kabupaten/kota;
3. Agar kinerja tidak terganggu dengan kurangnya jumlah pegawai, maka solusi yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di masing masing Bidang/bagian.

⁸² Wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon, pada tanggal 8 Januari 2019

Strategi ke depan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan mengusulkan penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya kepada Instansi terkait, agar disesuaikan dengan kebutuhan beban kerja Badan Kesbang dan Politik sehingga Kinerja Badan Kesbang dan Politik dapat berjalan dengan baik.

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon,⁸³ berdasarkan kendala yang dihadapi sebagaimana tersebut di atas beberapa Strategi Pemecahan Masalah yang dilakukan antara lain.

1. Adanya sumber daya Manusia yang memadai dalam Rangka Reformasi Birokrasi Nasional;
2. Meningkatnya kualitas SDM yang memahami dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Adanya Peningkatan Perangkat Hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Reformasi Nasional;
4. Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Politik;
5. Menambah jumlah personil anggota linmas inti Kota Cilegon
6. Menambah jumlah SDM untuk melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Mengusulkan pembentukan Badan Narkotika Nasional Tingkat Kota Cilegon.

Strategi ke depan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program, yakni dengan memaksimalkan peran dan fungsi struktural anggota Badan Kesbang

⁸³ Wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon, pada tanggal 8 Januari 2019

dan Politik Kota Cilegon melalui rapat-rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.

Adapun peluang dan hambatan wawasan kebangsaan yang ada antara lain dapat dilihat dari sisi konstelasi nasional dan konstelasi internasional

1. Konstelasi nasional

Kemajuan teknologi dan informasi serta transportasi membuka kemungkinan lebih besar bagi setiap warga negara Indonesia untuk mengenal atau lebih mengenal satu dengan yang lain. Wawasan kebangsaan Indonesia akan terbentuk dan berkembang dengan pesat bila muncul iklim dialog diatas. Hal lain yang mempunyai potensi untuk menghambat pembentukan dan pengembangan wawasan kebangsaan adalah berbagai kebijaksanaan pemerintah pusat yang kurang transparan.

2. Konstelasi internasional

Situasi perbincangan wawasan kebangsaan bertepatan waktu dengan meluasnya orang membicarakan masalah globalisasi. Kondisi internasional yang berakibat cepatnya perubahan yang melanda dunia yang menuntut pembaruan pelaksanaan sistem ekonomi pasar. Bangsa Indonesia tidak bisa tinggal diam menunggu perkembangan. Indonesia dengan wawasan kebangsaannya justru dapat memberi contoh bagi bangsa lain dalam membina identitas, kemandirian, dan menghadapi tantangan dari luar tanpa konfrontasi.⁸⁴

Wawasan kebangsaan intinya adalah loyalitas warga terhadap negara bangsanya. Bentuk loyalitas bagi bangsa Indonesia ini di antaranya adalah:

⁸⁴ Budiono Kusumohamidjojo, 1993, *Op. Cit*, hlm. 60

1. Mengaku bahwa dirinya adalah warga negara bangsa Indonesia, dengan kata lain bahwa ia dengan sadar mengakui sebagai pendukung cita-cita dan tujuan yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Cita-cita dan tujuan yang menjadi jati diri bangsa Indonesia tersebut adalah:
 - a. Tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa.
 - b. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan.
 - c. Tercapainya kesejahteraan yang adil lahir batin bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁸⁵
2. Mendudukan manusia menurut kodrat, harkat dan martabatnya.
3. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menghadapi berbagai persoalan.
4. Melandaskan diri pada keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menghadapi segala persoalan.
5. Mengusahakan agar cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia ini dapat terlaksana dengan sesungguhnya dalam segala aspek dan bidang kehidupan.
6. Bangga sebagai bangsa Indonesia, sehingga timbul rasa cinta untuk kemudian rela berkorban demi kepentingan bangsanya, dengan gambaran tersebut akan tercipta suatu suasana yang dalam bahasa daerah disebut:
 - a. *Rumangsa melu handarbeni* – *sense of belonging*,
 - b. *Rumangsa melu hangrungepi* – *senses of participation*, dan
 - c. *Mulat sariro hangroso wani* – *sense of respinsibility*.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 61

Dengan tercapainya suasana tersebut akhirnya akan berkembang menjadi solidaritas sosial. Yang menjadi pusat perhatian bukan kepentingan dan kesejahteraan pribadi tetapi kesejahteraan bersama.⁸⁶

Setiap bangsa mempunyai wawasan kebangsaan yang merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju ke masa depan. Kehidupan berbangsa dalam suatu negara memerlukan suatu konsep cara pandangan atau wawasan kebangsaan yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan kehidupan dan keutuhan bangsa dan wilayahnya serta jati diri bangsa itu. Bangsa yang dimaksudkan adalah bangsa yang bernegara. Perkembangan pemikiran bangsa Indonesia mengenai wawasan yang akan dianut dalam kehidupan bernegara dapat diikuti dalam sejarah pergerakan kemedekaan sejak tahun 1908, yaitu sejak kita sadar akan rasa kebangsaan. Inti dari wawasan nasional yang disebut wawasan nusantara adalah tekad untuk bersatu yang didasarkan pada cita-cita dan tujuan nasional.

Dorongan yang melahirkan kebangsaan Indonesia bersumber dari perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan. Wawasan nusantara Indonesia menolak segala diskriminasi suku, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedudukan maupun status sosial. Konsep kebangsaan kita bertujuan membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan.

Derasnya pengaruh globalisasi, bukan mustahil akan mempengaruhi adat budaya yang menjadi jati diri kita sebagai suatu bangsa dan akan melemahkan paham nasionalisme. Paham nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi terhadap masalah duniawi dari setiap warga bangsa ditunjukkan

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 145

kepada negara dan bangsa. Meskipun dalam awal pertumbuhan nasionalisme diwarnai oleh slogan yang sangat terkenal, yaitu: *liberty, equality, fraternity* yang merupakan pangkal tolak nasionalisme yang demokratis, namun dalam perkembangannya nasionalisme pada setiap bangsa sangat diwarnai oleh nilai-nilai dasar yang berkembang dalam masyarakatnya masing-masing, sehingga memberikan ciri khas bagi masing-masing bangsa.

Wawasan kebangsaan Indonesia memberi peran bagi bangsa Indonesia untuk proaktif mengantisipasi perkembangan lingkungan dengan memberi contoh bagi bangsa lain dalam membina identitas, kemandirian dan menghadapi tantangan dari luar tanpa konfrontasi dengan meyakinkan bangsa lain bahwa eksistensi bangsa merupakan aset yang diperlukan dalam mengembangkan nilai kemanusiaan yang beradab. Adapun nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki enam dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental yaitu:⁸⁷

1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa;
2. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu;
3. Cinta akan tanah air dan bangsa;
4. Demokrasi atau kedaulatan rakyat;
5. Kesetiakawanan sosial;
6. Masyarakat adil dan makmur.

Maka bagi bangsa Indonesia, untuk memahami bagaimana wawasan kebangsaan, perlu memahami secara mendalam falsafah Pancasila yang mengandung

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 62

nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa.

Apabila disimak esensi wawasan kebangsaan tersebut, maka yang paling mendasar dituntut kepada orang per orang, kelompok dan atau masyarakat adalah:⁸⁸

1. Adanya komitmen yang benar-benar dilandasi dengan semangat kebersamaan, senasib dan sepenanggungan;
2. Adanya semangat persatuan dan kesatuan untuk menghadapi berbagai tantangan baik lokal, regional maupun internasional yang senantiasa dilandasi cita-cita bersama yang terkait dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Nilai-nilai karakter bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ikhtiar bersama untuk menggerakkan pengamalan semangat kebangsaan yang bertumpu pada luasnya tugas generasi muda melalui kualitasnya dapat dispesifikasikan yakni sebagai (1) pencerahan dan penguat komitmen bangsa, dan (2) harkat kemandirian bangsa. Generasi muda mempunyai peran yang semakin konkrit dalam dinamika pembangunan bangsa. Aktualisasinya sudah menjangkau ke segala bidang, baik politik, sosial, dan budaya, maupun ekonomi.

Makna wawasan kebangsaan dapat diwujudkan melalui hal-hal sebagai berikut: (1) Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan individu atau golongan; (2) Wawasan kebangsaan tidak memberikan tempat pada patriotism yang licik; (3) Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga azas Bhineka Tunggal Ika

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 63

dipertahankan; 4) NKRI yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, bertekat untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju; 5) Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan dalam menjalankan misi ditengah-tengah tata kehidupan dunia.⁸⁹



⁸⁹ *Ibid*, hlm. 64